

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Seperti ditetapkan pada Naskah Akademik Penataan Profesional Konselor dan Layanan Bimbingan dan Konseling, bahwa konselor dituntut untuk mampu menyelenggarakan dan mengelola layanan bimbingan dan konseling di sekolah secara efektif.

Isu tentang mutu guru bimbingan dan konseling di sekolah perlu menjadi kepedulian berbagai pihak yang berkepentingan, mengingat dalam konteks pendidikan nasional, konselor adalah salah satu kualifikasi pendidik, dengan keahliannya yang unik, konselor dituntut untuk melaksanakan tugas-tugas profesionalnya secara sukses; sesuai dengan konteks tugas dan ekspektasi kinerja serta standar kompetensi konselor, disamping harus bekerja sama secara sinergis dengan komponen pendidik lainnya untuk melaksanakan misinya dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional. Keberadaan konselor dalam sistem pendidikan nasional dinyatakan sebagai salah satu kualifikasi pendidik, sejajar dengan kualifikasi guru, dosen pamong, tutor sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 (6) UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Taufiq, 2008).

Berdasarkan pasal 1 (6) UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, jelaslah bahwa salah satu misi pendidikan berkaitan erat dengan pembinaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kualitas tujuan dari pendidikan ini sangat tergantung pada kualitas tujuan dari kualitas pelaksanaan pendidikan di sekolah. Mengingat pentingnya berbagai unsur dalam meningkatkan mutu pendidikan maka pemerintah telah berupaya untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui berbagai pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan kualitas guru, pengadaan alat-alat pelajaran, buku-buku pelajaran, perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, serta peningkatan mutu pelaksanaan manajemen sekolah.

Pengawas sebagai salah satu pihak yang terkait, mempunyai kewajiban dalam menunjang proses peningkatan kemampuan konselor secara berkesinambungan,

Taufik B. Kusumah, 2016

PELAKSANAAN SUPERVISI GURU BIMBINGAN DAN KONSELING DI KABUPATEN CIREBON

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

sehingga program-program yang dilaksanakan tepat sasaran. Pengawas memiliki peran dan fungsi yang sangat sentral dan strategis dalam mendukung layanan bimbingan dan konseling yang bermutu karena tugas pengawas adalah penyelia atau supervisor dalam mengemban fungsi pembinaan keseluruhan aspek dan situasi pendidikan. Pengawas sekolah bidang bimbingan dan konseling ditugaskan secara penuh untuk melaksanakan pengawasan pendidikan di sekolah dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan melalui penilaian dan pembinaan dari segi teknis pendidikan dan administrasi layanan bimbingan dan konseling.

Dalam Keputusan Menpan No 118 / 1996 tentang jabatan fungsional pengawas sekolah dan angka kreditnya (Depdikbud 1996/1997) antara lain dikemukakan bahwa pengawas sekolah mempunyai empat bidang pengawasan, salah satunya adalah bidang pengawasan bimbingan dan konseling. Pengawas bimbingan dan konseling bertugas melakukan pengawasan bimbingan dan konseling di sekolah dengan melaksanakan penilaian dan pembinaan dari segi teknis bimbingan dan konseling dan administrasi pada satuan pendidikan dasar dan menengah.

Pengawas sebagai salah satu pihak yang terkait mempunyai kewajiban dalam menunjang proses peningkatan kemampuan konselor secara berkesinambungan sehingga program-program yang dilaksanakan tepat sasaran. Pengawas memiliki peran dan fungsi yang sangat sentral dan strategis dalam mendukung pembelajaran yang bermutu karena tugas pengawas adalah penyelia atau supervisor dalam mengemban fungsi pembinaan keseluruhan aspek dan situasi pendidikan.

Sesuai pula dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 12 Tahun 2007 tanggal 28 Maret 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah, dimana dalam melaksanakan tugas Pengawas Satuan Pendidikan SMP, SMA dan SMK diwajibkan mematuhi semua ketentuan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Data tentang pengawas guru bimbingan dan konseling di propinsi Jawa Barat (2005) mengindikasikan 42% pengawas bimbingan dan konseling tidak memiliki latar belakang pendidikan prajabatan dari program studi bimbingan dan konseling atau psikologi pendidikan dan bimbingan (Taufiq, 2008).

Al Hakim (2011, hlm. 67) hasil penelitian tentang kinerja guru pembimbing di kota Bandung dari 74 orang guru bimbingan dan konseling 42,74% (57 orang) diantaranya berada pada kategori baik. Guru bimbingan dan konseling yang termasuk pada kategori cukup baik sebanyak 11, 26% (9 orang) dan guru bimbingan dan konseling pada kategori kurang baik sebanyak 10,83% (8 orang). Artinya, sebagian besar guru bimbingan dan konseling SMA Negeri di Kota Bandung Tahun Ajaran 2011/2012 mampu berkinerja dengan baik.

Hasil penelitian Emin (2008) tentang kompetensi konselor di kabupaten Cirebon menunjukkan data kompetensi profesional diperoleh dari hasil penelitian terhadap 25 orang konselor SMA di Kabupaten Cirebon dalam menjalankan tugas pokok sebagai konselor, ditemukan yang menjawab tidak menguasai 1,67%, kurang menguasai, 19,91%, menguasai 63,72%, sedangkan yang sangat menguasai sebanyak 14,70%.

Emin (2008) juga menemukan kebutuhan akan supervisi guru bimbingan dan konseling di Kabupaten Cirebon dalam upaya peningkatan Kompetensi Profesional. Hasil penelitian terhadap 25 orang konselor SMA di Kabupaten Cirebon dalam menjalankan tugas pokok sebagai konselor, ditemukan yang menjawab tidak butuh 0,84%, kurang butuh, 10,60%, butuh 70,79%, sedangkan yang sangat butuh sebanyak 17,77%.

Kenyataan di sekolah-sekolah di Kabupaten Cirebon kinerja konselor masih perlu pembinaan. Keberadaan konselor belum mendapat pengakuan sebagaimana mestinya. Di sekolah guru-guru belum banyak mendukung kegiatan layanan bimbingan dan konseling, bahkan Kepala sekolah mengasumsikan tugas konselor dalam bentuk penegakan disiplin siswa. Persoalan ini disebabkan karena pelayanan bimbingan dan konseling hanya menangani kasus-kasus saja, seperti pelanggaran tata tertib sekolah, mengurus absensi atau kalau ada jam klasikal hanya mengajar pada jam yang sudah terjadwal saja. Sementara para siswa masih beranggapan kalau berurusan dengan konselor perlu diwaspadai, karena ada kesalahan mereka diberi sanksi atau surat panggilan untuk orang tua dan ada yang menganggap konselor sebagai polisi sekolah.

Perlunya bantuan supervisi terhadap guru bimbingan dan konseling berakar mendalam dalam kehidupan masyarakat. Supandi (1986, hlm. 252), menyatakan bahwa ada dua hal yang mendasari pentingnya supervisi dalam proses pendidikan:

1. Perkembangan Kurikulum merupakan gejala kemajuan pendidikan. Perkembangan kurikulum sering menimbulkan perubahan struktur maupun fungsi kurikulum. Pelaksanaan kurikulum memerlukan penyesuaian yang terus-menerus dengan keadaan nyata di lapangan. Hal ini berarti bahwa guru bimbingan dan konseling senantiasa harus berusaha mengembangkan kreativitasnya agar daya upaya pendidikan berdasarkan kurikulum dapat terlaksana secara baik. Banyak hal sering menghambat, yaitu tidak lengkapnya informasi yang diterima, keadaan sekolah yang tidak sesuai dengan tuntutan kurikulum, masyarakat yang tidak mau membantu, keterampilan menerapkan metode yang masih harus ditingkatkan dan bahkan proses memecahkan masalah belum terkuasai.
2. Pengembangan Personel, pegawai atau karyawan senantiasa merupakan upaya yang terus-menerus dalam suatu organisasi. Pengembangan formal menjadi tanggung jawab lembaga yang bersangkutan melalui penataran, tugas belajar, loka karya dan sejenisnya. Pengembangan informal merupakan tanggung jawab pegawai sendiri dan dilaksanakan secara mandiri atau bersama dengan rekan kerjanya, melalui berbagai kegiatan seperti kegiatan ilmiah, percobaan suatu metode mengajar, dan lain sebagainya. kegiatan supervisi pengajaran merupakan kegiatan yang wajib dilaksanakan dalam penyelenggaraan pendidikan.

Juntika Nurihsan (2005, hlm. 46) berpendapat bahwa manfaat supervisi dalam program bimbingan ialah: mengontrol kegiatan-kegiatan dari para personil bimbingan yaitu bagaimana pelaksanaan tugas dan tanggung jawab mereka masing-masing, mengontrol adanya kemungkinan hambatan-hambatan yang ditemui oleh para personil bimbingan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing, memungkinkan dicarinya jalan keluar terhadap hambatan-hambatan dan permasalahan-permasalahan yang ditemuinya dan memungkinkan terlaksananya program bimbingan secara lancar ke arah pencapaian tujuan sebagaimana yang telah ditetapkan.

1.2. Identifikasi dan Rumusan Masalah

Penelitian ini berkenaan dengan upaya memotret atau menggambarkan pelaksanaan supervisi bimbingan dan konseling di sekolah. Secara umum pertanyaan penelitian adalah bagaimana gambaran pelaksanaan supervisi guru bimbingan dan konseling Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Cirebon.

1. Bagaimana gambaran pelaksanaan supervisi guru bimbingan dan konseling sebagaimana dialami guru bimbingan dan konseling di SMA Negeri Cirebon, meliputi:
 - a. Seting (waktu, tempat, frekuensi) supervisi.
 - b. Maksud dan tujuan supervisi.
 - c. Langkah dan kegiatan yang dilakukan oleh guru bimbingan dan konseling dari sebelum, pada saat, dan setelah supervisi.
 - d. Sasaran dan focus supervisi.
 - e. Peran yang dilakukan supervisor bimbingan dan konseling.
 - f. Hasil yang diperoleh dan dampak yang dirasakan.
2. Bagaimana gambaran pelaksanaan supervisi guru bimbingan dan konseling sebagaimana yang dilakukan pengawas bimbingan dan konseling di SMA Negeri Cirebon, meliputi:
 - a. *Setting* (waktu, tempat, frekuensi) supervisi.
 - b. Maksud dan tujuan supervisi.
 - c. Langkah dan kegiatan yang dilakukan oleh guru bimbingan dan konseling dari sebelum, pada saat, dan setelah supervisi.
 - d. Sasaran dan fokus supervisi.
 - e. Peran yang dilakukan supervisor bimbingan konseling.
 - f. Hasil yang diperoleh dan dampak yang dirasakan.

1.3. Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk dapat menggambarkan pelaksanaan supervisi kinerja guru bimbingan dan konseling di sekolah. Adapun tujuan khusus penelitian adalah untuk mengungkap:

1. Gambaran pelaksanaan supervisi guru bimbingan dan konseling sebagaimana dialami guru bimbingan dan konseling di SMA Negeri Kabupaten Cirebon.
2. Gambaran pelaksanaan supervisi guru bimbingan dan konseling sebagaimana yang dilakukan pengawas bimbingan dan konseling di SMA Negeri Kabupaten Cirebon.

1.4. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan tujuan penelitian di atas, hasil penelitian ini diharapkan:

1. Sebagai bahan masukan dan sebagai bahan evaluasi diri bagi pengawas/supervisor dalam meningkatkan kualitas kinerjanya dalam melaksanakan supervisi khususnya supervisi kinerja guru bimbingan dan konseling di sekolah.
2. Pihak Departemen PPB FIP UPI berkewajiban untuk mendorong munculnya para calon konselor dan supervisor yang mempunyai pengetahuan yang layak dalam serta membantu mengembangkan keyakinan dan kemampuan sebagai guru bimbingan dan konseling sehingga menjadi lebih efektif sebagai pekerja sosial profesional.
3. Bagi peneliti lain, hasil penelitian yang didapatkan diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk melihat supervisi dalam hal kompetensi supervisor, bisa dijadikan dasar program diklat untuk meningkatkan kinerja supervisor yang profesional, dan bisa mengetahui pengaruh supervisi akan peningkatan kinerja guru bimbingan dan konseling di sekolah.

1.5. Struktur Organisasi Skripsi

Struktur organisasi skripsi ini meliputi BAB I Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang penelitian, identifikasi dan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, asumsi penelitian, dan struktur organisasi skripsi. BAB II Kajian Pustaka yang terdiri dari pengantar, batang tubuh, serta simpulan. BAB III Metode Penelitian, yang terdiri dari populasi dan sampel penelitian, metode penelitian, definisi operasional, instrumen penelitian, langkah-langkah penelitian, dan teknik analisis data. BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan yang memaparkan hasil penelitian serta pembahasan. BAB V Kesimpulan dan Rekomendasi.